

PERBANDINGAN EKONOMI PERDAGANGAN DI INDONESIA DAN THAILAND

Rindiani

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan,
Email: rindiani282828@gmail.com

Sinta Sakinatu Sadiyah

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan,
Email: siintasakinatu119@gmail.com

Putri Mulyaningsih

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan,
Email: 1008putri@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini menyajikan survei analitis mengenai kebijakan perdagangan di Indonesia dan Thailand, dalam konteks temuan-temuan utama dari Tinjauan Kebijakan Perdagangan WTO tahun 2020. Kedua negara ini merupakan negara yang secara historis memiliki perekonomian yang dinamis yang terintegrasi dalam protokol ASEAN yang berpandangan ke luar serta jaringan perdagangan dan investasi Asia Timur yang berpusat di Tiongkok. Tujuan dari penulisan ini untuk membandingkan kelayakan insentif perdagangan dan dampak dari insentif untuk investasi asing langsung (FDI) pertumbuhan. Selama dekade terakhir, tidak ada perubahan besar dalam pengaturan kebijakan perdagangan dan komersial kedua negara, dengan Thailand mempertahankan pengaturan ekonominya yang lebih terbuka dan Indonesia melanjutkan penerimaannya yang lebih ragu-ragu terhadap globalisasi. Oleh karena itu, pendorong utama pengaturan kebijakan domestik adalah faktor-faktor global, termasuk terus meningkatnya peran Cina dalam perekonomian regional dan global serta rantai pasokan global yang semakin berpusat pada Cina. Kedua laporan WTO tersebut memberikan kajian yang komprehensif mengenai pola dan kebijakan perdagangan, meskipun masih ada ruang untuk memperkuat dasar-dasar analitis dari laporan-laporan selanjutnya.

Kata Kunci: *Indonesia, Thailand, ASEAN, integrasi regional, kebijakan perdagangan, rantai pasok global.*

PENDAHULUAN

Indonesia dan Thailand secara historis merupakan negara dengan perekonomian dinamis yang sangat terintegrasi dalam jaringan perdagangan dan investasi Asia Timur yang berwawasan ke luar. Kedua negara ini merupakan anggota pendiri ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang beranggotakan 10 negara, dengan populasi 670 juta jiwa dan merupakan pengelompokan regional yang paling kuat di negara berkembang. Mereka juga merupakan pemain penting dalam rantai pasokan global (global supply chain/GSC) yang semakin berpusat di Tiongkok yang melintasi batas-batas negara dalam operasi produksi yang terintegrasi secara vertikal dalam industri elektronik, otomotif, barang mesin, dan industri terkait.

Makalah ini menyoroti persamaan dan perbedaan antara kedua negara. Yang pertama mencakup kedekatan geografis, peran kunci mereka di ASEAN sebagai dua negara dengan ekonomi terbesar, manajemen ekonomi makro yang secara umum bijaksana, dan keterbukaan ekonomi yang semakin meningkat dalam perjalanan sejarah ekonomi yang panjang. Yang terakhir ini mencakup pendekatan mereka yang kontras terhadap globalisasi; Thailand adalah 'ekonomi yang selalu terbuka', di samping Indonesia yang lebih ragu-ragu dalam merangkul keterbukaan ekonomi dan dengan episode-episode liberalisasi perdagangan yang besar dan juga kembalinya nasionalisme ekonomi. Kedua negara ini juga berada pada tahap pembangunan yang berbeda dan memiliki struktur ekonomi yang berbeda: Indonesia

adalah negara yang relatif kaya akan sumber daya alam, sedangkan Thailand adalah negara yang lebih berorientasi pada jasa dengan sektor pariwisata yang sangat besar. Selain itu, Thailand adalah importir tenaga kerja yang signifikan sedangkan Indonesia adalah eksportir tenaga kerja.

Makalah ini memberikan survei analitis terhadap pola dan kebijakan perdagangan kedua negara, berdasarkan Tinjauan Kebijakan Perdagangan (TPR) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tahun 2020. Bagian 2 memberikan beberapa pengamatan latar belakang pada kedua negara serta pengaturan dan orientasi kebijakan perdagangan mereka secara umum. Bagian 3 dan 4 mengkaji pola dan kebijakan perdagangan mereka secara lebih rinci, dengan mengacu pada dua laporan WTO (2020a, 2020b). Bagian 5 merangkum temuan-temuan utama dan memberikan beberapa saran untuk tinjauan kebijakan perdagangan di masa depan.

DUA NEGARA EKONOMI

Dengan jumlah penduduk gabungan sebesar 345 juta jiwa, Indonesia dan Thailand adalah dua negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kedua negara ini merupakan negara berpenghasilan menengah ke atas yang secara historis merupakan negara yang dinamis. Keduanya merupakan salah satu dari tujuh ekonomi 'keajaiban' Asia Timur dalam studi Bank Dunia tahun 1993. Dari 150 negara yang diteliti oleh Komisi Pertumbuhan 2008, mereka juga dikelompokkan bersama 11 negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi lainnya.

Dinamisme ekonomi kedua negara ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pendapatan per kapita Thailand telah meningkat sekitar sebelas kali lipat sejak tahun 1960 dan lebih dari enam kali lipat untuk Indonesia. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita di Filipina meningkat tiga kali lipat selama periode ini, yang juga mendekati angka global. Dengan kata lain, kedua negara ini, khususnya Thailand, telah tumbuh jauh lebih cepat daripada rata-rata global. Sebagai hasilnya, standar hidup telah meningkat dan kemiskinan telah turun dengan cepat di kedua negara.

Pertumbuhan ekonomi ini telah dipertahankan selama abad ke-21, dengan pendapatan per kapita yang hampir dua kali lipat antara tahun 2000-19. Namun, pertumbuhan agak melambat di kedua negara, karena berbagai alasan yang terkait dengan literatur tentang apa yang disebut jebakan pendapatan menengah. Kedua negara telah terpengaruh secara negatif oleh pandemi Covid, khususnya Thailand, sebagian karena orientasi internasionalnya yang lebih besar, termasuk ketergantungan yang besar pada pariwisata internasional. Masih terlalu dini untuk memperkirakan lintasan pemulihan pasca pandemi, tetapi ada prospek yang masuk akal bahwa mereka akan kembali ke jalur pertumbuhan sebelumnya.

Struktur ekonomi kedua negara berbeda dalam beberapa hal penting. Thailand terus menjadi pengekspor makanan utama dan, dikombinasikan dengan orientasi internasionalnya yang lebih besar, Thailand merupakan rumah bagi beberapa konglomerat agribisnis besar. Negara ini

juga telah berhasil mengadopsi strategi manufaktur yang berorientasi ekspor, dengan sektor elektronik dan otomotif besar yang sangat terintegrasi dalam GSC. Selain itu, negara ini juga memiliki ekonomi jasa yang berorientasi internasional, seperti yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, adalah negara pengekspor energi yang kaya akan sumber daya alam, dan juga salah satu pengekspor hasil bumi tropis terbesar di dunia. Akibatnya, Indonesia telah mengalami episode-episode volatilitas nilai tukar, dan apa yang disebut sebagai Dutch Disease selama periode harga-harga komoditas yang tinggi. Namun demikian, Indonesia secara umum telah mengelola ekonomi makro dengan hati-hati, seperti halnya Thailand. Faktanya, sebelum pandemi Covid, selama setengah abad terakhir, kedua negara ini hanya mengalami satu kali resesi ekonomi besar, yaitu Krisis Keuangan Asia (Asian Financial Crisis/AFC) 1997-98. Tidak adanya ketidakselarasan nilai tukar yang serius secara umum telah menghilangkan pemicu meningkatnya proteksionisme perdagangan yang sering terjadi di banyak negara berkembang.

Kebijakan perdagangan dan komersial kedua negara telah dibentuk oleh interaksi berbagai faktor, termasuk geografi, kekayaan sumber daya alam, sejarah, ideologi, institusi, dan ekonomi global. Sebagai tanggapan terhadap pemerintahan kolonial dan perjuangan kemerdekaan selama berabad-abad, oposisi yang kuat terhadap liberalisme ekonomi telah terbukti selama beberapa periode di Indonesia, yang mengakibatkan Indonesia keluar dari semua organisasi internasional utama dan

menasionalisasi semua properti asing pada awal tahun 1960-an. Namun, sejak akhir 1960-an, Indonesia telah menjadi negara dengan ekonomi yang terbuka secara luas, meskipun dengan ambivalensi yang terus berlanjut tentang manfaat globalisasi. Sebaliknya, Thailand tidak pernah dijajah, dan tidak pernah mengalami perubahan besar dalam kebijakan perdagangan dan komersialnya. Thailand merupakan salah satu dari enam negara berkembang yang diklasifikasikan sebagai 'selalu terbuka' dalam studi perintis Sachs dan Warner (1995). Kebijakan ini tetap berwawasan ke luar, meskipun agak kurang bergantung pada perdagangan dari waktu ke waktu, dan terlepas dari beberapa kantong proteksionisme perdagangan.

Pengaturan kebijakan ini tercermin dalam ringkasan indikator pada Tabel 1. Thailand secara signifikan lebih berorientasi pada perdagangan daripada Indonesia, meskipun tidak seterbuka Malaysia. Kedua negara ini memiliki skor yang cukup tinggi dalam berbagai indikator kebebasan ekonomi. Kedua negara ini juga merupakan penerima investasi asing langsung (FDI) yang signifikan, sekali lagi lebih besar untuk Thailand, sebagai hasil dari rezim kebijakan yang lebih terbuka. Kedua negara memiliki rata-rata tarif tertimbang yang rendah untuk barang-barang impor. Rata-rata Thailand sedikit lebih tinggi, namun seperti yang akan dibahas dalam dua bagian berikut, Indonesia memiliki penyebaran tarif yang lebih tinggi dan ketergantungan yang lebih besar pada hambatan non-tarif. Orientasi internasional Thailand yang lebih besar dan lebih tahan lama telah mewariskan konstituen ekspor yang kuat dan berpengaruh secara politis

yang pada gilirannya membatasi tekanan proteksionisme kebijakan perdagangan.

Thailand juga lebih terbuka untuk perdagangan jasa dan khususnya pergerakan orang lintas batas. Thailand merupakan salah satu tujuan wisata utama di negara berkembang, yang untuk sementara waktu terganggu karena pandemi Covid, dan pariwisata menyumbang 12% dari PDB-nya. Selain itu, Bangkok juga merupakan pusat penerbangan sipil regional dan internasional. Perbatasan internasionalnya juga terbuka, dan terbuka untuk migrasi tenaga kerja yang ekstensif dari negara-negara tetangga yang lebih miskin, sebagian besar bersifat semu, dan baik untuk sementara maupun permanen. Meskipun terbuka untuk turis, Indonesia mengadopsi pendekatan yang jauh lebih ketat untuk mobilitas tenaga kerja ke dalam. Indonesia juga merupakan pengekspor tenaga kerja yang signifikan, terutama ke negara tetangga Malaysia. Thailand juga memiliki posisi yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam perdagangan elektronik dan perdagangan digital global yang berkembang pesat, seperti yang ditunjukkan oleh penetrasi internet yang jauh lebih tinggi.

Ada juga perbedaan institusional dan politik antara kedua negara yang berimplikasi pada pelaksanaan kebijakan perdagangan dan komersial. Indonesia memiliki peringkat yang lebih tinggi dalam berbagai indikator demokrasi, dengan implikasi bahwa pasar politik untuk intervensi perdagangan lebih terbuka dan dapat diperebutkan. Indonesia juga memiliki lingkungan peraturan bisnis yang kompleks dan memiliki peringkat yang kurang baik dalam berbagai survei internasional tentang

korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang lingkup yang lebih besar untuk perilaku perburuan rente, termasuk karena hal ini mempengaruhi kebijakan perdagangan. Indonesia juga memiliki sektor perusahaan negara yang lebih besar, yang pada sektor-sektor tertentu yang dapat diperdagangkan meningkatkan tekanan untuk proteksi impor. Kami akan kembali membahas isu-isu ini di bawah ini dalam survei-survei negara.

Kebijakan perdagangan dan komersial di Indonesia dan Thailand juga dibentuk oleh dua faktor utama, yaitu keanggotaan ASEAN dan partisipasi dalam GSC. Indonesia dan Thailand merupakan anggota penting ASEAN, dan ASEAN telah menjadi penting bagi mereka bukan hanya untuk perdagangan tetapi juga dalam membentuk kebijakan komersial internasional mereka. Thailand memainkan peran penting sejak awal, menjadi tuan rumah penandatanganan Deklarasi Bangkok yang membentuk ASEAN pada bulan Agustus 1967. Satu dekade kemudian, Sekretariat ASEAN didirikan di Jakarta. Pengaruh keanggotaan ASEAN terhadap kebijakan perdagangan dan investasi dimulai dengan ASEAN Free Trade Area pada tahun 1992 hingga ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) pada tahun 2009 dan akhirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, yang akan berakhir pada tahun 2025. Kedua negara ini juga merupakan pihak dalam berbagai FTA "ASEAN+1", beberapa di antaranya akan dikonsolidasikan dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), yang telah diratifikasi oleh Thailand namun belum diratifikasi oleh Indonesia. Keduanya adalah

anggota Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) namun tidak menjadi anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) meskipun keduanya telah mengindikasikan ketertarikan untuk bergabung. Thailand memiliki 6 FTA bilateral tambahan yang berlaku, 3 di antaranya dengan negara-negara yang telah tercakup dalam perjanjian ASEAN+1, sementara Indonesia memiliki 2 perjanjian yang tidak tumpang tindih.

Perjanjian-perjanjian ini telah memaksa Indonesia dan Thailand untuk mempercepat reformasi domestik dan perdagangan untuk memenuhi komitmen mereka. Dengan adanya kepentingan-kepentingan yang menentang reformasi di dalam negeri, perjanjian-perjanjian ini telah memungkinkan kebijakan-kebijakan yang sulit untuk dilaksanakan dengan menggunakan apa yang disebut sebagai argumen "tangan kita terikat" dan meminimalkan kemunduran reformasi selama periode pertumbuhan rendah atau krisis. Ada tekanan untuk apa yang kadang-kadang disebut 'liberalisasi kompetitif', di mana negara-negara membuka diri setelah melihat keberhasilan negara tetangga. Pada awalnya, ini adalah peran kunci Singapura dan pada tingkat yang lebih rendah Malaysia. Pada abad ini, Kamboja dan Vietnam yang merupakan negara yang lebih baru telah membuka diri secara agresif, dalam beberapa hal bahkan menyalip beberapa negara anggota ASEAN.

Sebagian besar perjanjian terkait ASEAN telah berfungsi sebagai bangunan dan bukannya batu sandungan dalam membuka ekonomi mereka dengan cara yang tidak

diskriminatif (Hill dan Menon, 2012). Tarif preferensial hampir sepenuhnya dimultilateralisasi; untuk lebih dari 95% jalur tarif ATIGA untuk Indonesia dan Thailand, margin preferensinya nol (ERIA, 2021). Dengan cara ini, ASEAN telah membantu mengglobalkan lebih dari sekadar regionalisasi ekonomi-ekonomi ini. Mengingat keterlibatan Thailand yang sudah sangat besar dalam GSC di sektor elektronik dan otomotif, aspek non-diskriminatif dan berwawasan ke luar dari perjanjian regional ini menjadi sangat penting.

Hal ini juga berlaku untuk Indonesia, yang mencoba untuk meningkatkan keterlibatannya dalam GSC di bidang elektronik, mulai dari basis yang rendah, dan bergerak melampaui perakitan sederhana di sektor otomotif. Agar FTA dapat bermanfaat bagi GSC, FTA harus lebih dari sekedar tarif. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam GSC biasanya berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Industri (seperti yang dikenal di Thailand), di mana bea masuk dibebaskan untuk sebagian besar impor mereka melalui berbagai skema pembebasan bea masuk. Untuk GSC yang terkait dengan elektronik, Perjanjian Teknologi Informasi (ITA) dan perluasannya (ITA2) menghapuskan bea masuk atas 97% produk teknologi informasi dan komunikasi yang diperdagangkan (WTO, 2021). Untuk mendukung perdagangan GSC, FTA harus berurusan dengan sejumlah besar aturan dan regulasi perdagangan dan hambatan non-tarif lainnya yang secara substansial dapat meningkatkan biaya perdagangan. Terlepas dari fasilitas perdagangan yang berkaitan dengan prosedur bea cukai dan sejenisnya,

perjanjian ASEAN belum mengalami kemajuan yang berarti di bidang-bidang lainnya (lihat Menon, 2018).

Mungkin melalui perjanjian perdagangan modern seperti RCEP, atau CPTPP di masa depan, berbagai masalah WTO+ dan WTO-X dapat ditangani di negara-negara ini untuk mendukung partisipasi mereka dalam GSC. Meskipun pendekatan "jumlah kecil" terhadap isu-isu kompleks seperti perdagangan digital yang melibatkan perjanjian bilateral dan trilateral sedang diupayakan oleh Singapura dengan beberapa mitra CPTPP-nya, kecil kemungkinannya bahwa perjanjian bilateral di mana Indonesia atau Thailand terlibat di dalamnya akan atau dapat melakukan hal yang sama. Ini bukan hanya tentang modalitas, meskipun Thailand telah lebih proaktif daripada Indonesia dalam merangkul digitalisasi, perhatian lebih terfokus pada e-commerce daripada isu-isu sensitif yang berkaitan dengan transfer data dan pelokalan. Alih-alih mengurangi biaya perdagangan, proliferasi perjanjian bilateral yang melibatkan Indonesia dan Thailand justru menciptakan kesepakatan yang tumpang tindih dan tidak ramah terhadap GSC. Seperti yang telah disebutkan, RCEP dapat menghapus beberapa kontradiksi dan tumpang tindih ini, tetapi sisanya harus dinetralisir melalui proses multilateralisasi sepihak (Menon, 2014).

INDONESIA

Seperti yang telah disebutkan, Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang cukup terbuka meskipun ada keraguan tentang globalisasi dari beberapa bagian yang berpengaruh dalam pemerintahan dan

masyarakat. Dari menjadi anggota 'poros Peking-Pyongyang-Hanoi-Phnom Penh-Jakarta' yang terdiri dari negara-negara yang baru muncul di awal tahun 1960-an, pendulum kebijakan perdagangan dan komersial telah berayun bolak-balik, dari periode-periode kebijakan ekonomi yang sangat terbuka hingga episode-episode nasionalisme ekonomi dan sikap yang lebih berorientasi ke dalam. Selama era otoriter Soeharto, 1966-1998, pertarungan kebijakan secara luas terjadi antara 'teknokrat' yang lebih berorientasi pada pasar, dan kelompok nasionalis ekonomi, perencana industri, dan 'ahli teknologi', yang masing-masing berafiliasi dengan para pemburu rente. Para teknokrat umumnya diberdayakan pada masa-masa ekonomi yang lebih sulit, ketika reformasi menjadi keharusan untuk mempertahankan pertumbuhan, oleh karena itu, muncullah frasa yang mengatakan bahwa "masa-masa sulit menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik" (Basri dan Hill, 2004). Pada kenyataannya, reformasi kebijakan besar pada tahun 1980-an menghasilkan tingkat perlindungan efektif yang relatif seragam dan ketergantungan yang terbatas pada hambatan non-tarif (Fane dan Condon, 1996), terlepas dari korupsi yang semakin parah yang terkait dengan kepentingan bisnis keluarga Soeharto.

Selama era demokrasi, dari tahun 1999 dan seterusnya, ketegangan dan ayunan pendulum ini terus berlanjut, di samping tekanan politik elektoral dalam pembuatan kebijakan perdagangan. Namun demikian, bahkan pada masa-masa 'indah' ketika harga komoditas melonjak selama periode ini, nasionalisme ekonomi yang meningkat telah diredam oleh tiga faktor:

Komitmen ASEAN dan komitmen regional dan internasional lainnya; kontrol teknokratis atas Kementerian Keuangan; dan fakta bahwa di luar ambang batas tertentu, hambatan impor yang tinggi mengundang penyelundupan fisik dan teknis yang ekstensif.

Ada tiga implikasi langsung dari pendulum kebijakan yang berayun-ayun ini. Pertama, terlepas dari 'Deklarasi Bogor' APEC tahun 1994, Indonesia secara umum belum menjadi pemain utama dalam inisiatif kebijakan perdagangan regional dan internasional, dan lebih memilih untuk 'duduk di pagar' (Basri, 2012). Kedua, menteri perdagangan adalah orang yang ditunjuk oleh presiden, dan telah sering terjadi pergantian dalam posisi tersebut. Selama satu dekade terakhir, misalnya, tidak kurang dari tujuh menteri perdagangan, masing-masing dengan latar belakang politik dan keahlian teknis yang berbeda, dan mereka memiliki pandangan yang sangat berbeda (dan dalam beberapa kasus, kontroversial) mengenai isu-isu perdagangan, mulai dari yang sangat liberal dan internasional hingga yang sangat proteksionis. Ketiga, dan sebagian sebagai konsekuensinya, kebijakan perdagangan dan industri cenderung tidak koheren. Salah satu ilustrasi yang sering muncul dari proposisi ini adalah strategi penerapan langkah-langkah kandungan lokal di bidang manufaktur bersamaan dengan keinginan para pembuat kebijakan. Seperti yang telah diamati pada bagian sebelumnya, dan juga disebutkan dalam laporan WTO, peran Indonesia dalam kegiatan-kegiatan ini sangat kecil, terutama mengingat peran aktif yang dimainkan oleh beberapa negara

tetangganya, termasuk reformis yang lebih baru seperti Vietnam. Alasan dari rendahnya kinerja ini pada dasarnya adalah lingkungan kebijakan dalam negeri.

Tinjauan Kebijakan Perdagangan (TPR) WTO (2020b) tentang Indonesia, yang pertama kali dilakukan dalam tujuh tahun terakhir, secara komprehensif mengkaji hal ini dan banyak isu lainnya. Setelah melakukan survei ekonomi secara umum, termasuk pujian yang pantas untuk kinerja ekonomi Indonesia yang cukup kuat sebelum pandemi COVID-19, dan dampak ekonomi yang relatif moderat akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020, laporan ini menyelidiki banyak aspek kebijakan dan kinerja perdagangan. Secara tepat, penelitian ini menempatkan studi ini dalam konteks yang lebih luas dari hubungan perdagangan Indonesia. Hal ini mencakup struktur ekspor yang terdiversifikasi (Tabel 2). Pada tahun 2019, bahan bakar (20,8%) dan pertanian lainnya (17,0%) merupakan dua kelompok ekspor terbesar, sementara 10 produk lainnya masing-masing berkontribusi antara 5-10%. Industri manufaktur sebagai sebuah kelompok menyumbang 45,8% dari total ekspor. Porsi ini secara garis besar sama di tahun 2012, kecuali untuk porsi bahan bakar yang lebih tinggi dan porsi manufaktur yang lebih rendah. Perlu diingat bahwa pada tahun sebelumnya harga-harga komoditas berada pada tingkat yang tinggi secara historis, dan pangsa bahan bakar yang lebih tinggi disebabkan oleh kenaikan harga batubara dan gas.

Seperti yang telah diamati pada bagian sebelumnya, dan juga disebutkan dalam laporan WTO, peran Indonesia dalam

kegiatan-kegiatan ini sangat kecil, terutama mengingat peran aktif yang dimainkan oleh beberapa negara tetangganya, termasuk reformis yang lebih baru seperti Vietnam. Alasan dari rendahnya kinerja ini pada dasarnya adalah lingkungan kebijakan dalam negeri.

Tinjauan Kebijakan Perdagangan (TPR) WTO (2020b) tentang Indonesia, yang pertama kali dilakukan dalam tujuh tahun terakhir, secara komprehensif mengkaji hal ini dan banyak isu lainnya. Setelah melakukan survei ekonomi secara umum, termasuk pujian yang pantas untuk kinerja ekonomi Indonesia yang cukup kuat sebelum pandemi COVID-19, dan dampak ekonomi yang relatif moderat akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020, laporan ini menyelidiki banyak aspek kebijakan dan kinerja perdagangan. Secara tepat, penelitian ini menempatkan studi ini dalam konteks yang lebih luas dari hubungan perdagangan Indonesia. Hal ini mencakup struktur ekspor yang terdiversifikasi (Tabel 2). Pada tahun 2019, bahan bakar (20,8%) dan pertanian lainnya (17,0%) merupakan dua kelompok ekspor terbesar, sementara 10 produk lainnya masing-masing berkontribusi antara 5-10%. Industri manufaktur sebagai sebuah kelompok menyumbang 45,8% dari total ekspor. Porsi ini secara garis besar sama di tahun 2012, kecuali untuk porsi bahan bakar yang lebih tinggi dan porsi manufaktur yang lebih rendah. Perlu diingat bahwa pada tahun sebelumnya harga-harga komoditas berada pada tingkat yang tinggi secara historis, dan pangsa bahan bakar yang lebih tinggi disebabkan oleh kenaikan harga batubara dan gas.

Kontribusi utama dari laporan ini adalah survei yang sangat rinci mengenai tarif Indonesia dan peraturan perdagangan terkait. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Pertama, tarif saat ini merupakan sumber pendapatan pemerintah yang kecil, hanya menghasilkan 2,6% dari total pendapatan pajak pada tahun 2018. Implikasi (yang tidak disebutkan) adalah bahwa liberalisasi perdagangan lebih lanjut, yaitu penurunan tarif, tidak akan memiliki implikasi fiskal yang merugikan secara signifikan. Bahkan, ceteris paribus, tarif dari berbagai NTB dan pembatasan perdagangan lainnya mungkin akan benar-benar meningkatkan pendapatan tarif. Kedua, meskipun rata-rata tarif yang diterapkan rendah, terdapat berbagai macam tarif, yang terdiri dari 17 bea masuk ad valorem dan lima bea masuk spesifik. Hal ini dirangkum dalam Grafik 3.1 dan 3.2 TPR. Jumlah ini sedikit meningkat dari tinjauan tahun 2013. Penyebaran tarif juga meningkat, dan eskalasi tarif di seluruh tahapan produksi menjadi lebih jelas. Banyaknya tingkat tarif memiliki implikasi (lagi-lagi tidak disebutkan) bahwa hal ini meningkatkan kemungkinan penyelundupan teknis melalui pengalihan barang yang masuk ke jalur tarif yang lebih rendah.

Ciri ketiga adalah bahwa distribusi tarif antar sektor mencerminkan prioritas pemerintah, yang pada gilirannya mencerminkan lobi politik untuk perlindungan. Dengan demikian, tarif tertinggi adalah untuk proteksi pertanian tertentu, khususnya beras, di mana larangan impor secara berkala telah diberlakukan. Perlindungan tarif untuk beberapa industri manufaktur juga telah meningkat, terutama

terkait dengan inisiatif pemerintah pada tahun 2018 yang dikenal sebagai 'Making Indonesia 4.0'. Keempat, laporan tersebut menarik perhatian pada berbagai tindakan non-tarif, termasuk berbagai NTB, pajak ekspor (terutama untuk mendukung kegiatan pengolahan hilir), dan larangan ekspor, yang terakhir termasuk keputusan kontroversial untuk melarang ekspor bijih nikel. Namun, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengukur kesetaraan tarif dari berbagai intervensi ini.

Selain intervensi perdagangan formal tersebut, laporan ini mendokumentasikan berbagai kebijakan tambahan yang berimplikasi pada pelaksanaan kebijakan perdagangan. Salah satunya adalah berbagai zona ekspor yang dimiliki Indonesia, baik zona ekonomi khusus maupun zona perdagangan bebas, yang keduanya memiliki pengaturan regulasi yang telah ditetapkan. Secara historis, hal ini merupakan fitur yang cukup signifikan dalam kebijakan perdagangan Indonesia di berbagai periode, terutama zona ekspor Batam yang terhubung dengan Singapura. Selama beberapa tahun, zona Batam menyumbang sekitar setengah dari peningkatan ekspor manufaktur Indonesia, karena Singapura memindahkan beberapa kegiatan manufaktur dan jasa padat karya ke pulau yang berdekatan ini. Kawasan ini juga termasuk dalam zona pabean Singapura dalam perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Namun, Indonesia telah membongkar sebagian besar pengaturan bea cukai ini dan menggantinya dengan lingkungan peraturan yang sebagian besar tidak sesuai dengan perdagangan lintas batas yang cepat dan efisien (Hutchison, 2017).

Laporan ini juga mendokumentasikan sektor badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia dan juga berbagai program pengadaan barang dan jasa pemerintah. Indonesia selalu memiliki sektor BUMN yang besar karena berbagai alasan historis, ideologis, dan pragmatis. BUMN terdapat di hampir semua sektor ekonomi, dengan kehadiran yang signifikan di sektor perbankan, utilitas, telekomunikasi, transportasi, dan industri berat. Pada umumnya tidak ada implikasi besar terhadap kebijakan perdagangan, selain dari subsidi langsung dan tidak langsung yang mereka terima, dan hambatan masuk yang biasanya lebih tinggi di sektor-sektor di mana mereka signifikan. Program-program pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagian besar berskala kecil dan terutama ditujukan untuk mendukung usaha kecil dan menengah.

THAILAND

Thailand adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi yang dikombinasikan dengan fundamental ekonomi makro yang kuat dapat secara tajam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup, bahkan di negara yang relatif besar dan padat penduduknya. Meskipun ada banyak contoh negara kecil dengan populasi yang tidak terlalu besar yang menggunakan kebijakan serupa untuk mencapai hasil ini, hanya sedikit negara dengan populasi besar yang dapat melakukannya seefektif Thailand. Setelah pulih dari Krisis Ekonomi Asia (AFC) pada tahun 1997-98 dan kemudian Krisis Keuangan Global (KKG) yang lebih ringan pada tahun 2008-2009, dan meskipun

ada beberapa episode ketidakstabilan politik, kebijakan perdagangan, investasi, dan ekonomi makro tetap sangat konsisten. Dengan latar belakang inilah WTO menyelesaikan TPR kedelapan Thailand pada September 2020. Meskipun TPR tersebut mencakup periode dari 2015 hingga 2019, TPR tersebut juga mencakup beberapa diskusi tentang dampak pandemi pada tahun 2020. Meskipun kebijakan perdagangan Thailand sebelum AFC dicirikan oleh liberalisasi sepihak yang tidak diskriminatif, yang diperkuat oleh Perjanjian Putaran Uruguay, kebijakan ini telah bergeser secara tegas ke arah perjanjian perdagangan preferensial, terutama perjanjian bilateral (Sally, 2007).

Yang juga memprihatinkan adalah kompleksitas dan penyebaran tarif dalam struktur tarifnya, seperti yang disoroti oleh TPR. Tingkat tarif berkisar dari nol hingga 226% ketika ekuivalen ad valorem tidak termasuk, dan 557% ketika ekuivalen ad valorem dimasukkan. Produk pertanian menghadapi tingkat tarif yang jauh lebih tinggi (rata-rata 32,7%) dan hambatan non-tarif (NTB) dibandingkan produk non-pertanian (rata-rata 11,8%). Sebagian besar NTB berlaku untuk produk pertanian yang sensitif seperti kedelai, biji kelapa sawit, sutra, dan susu (Jongwanich, 2021). Terakhir, perlu dicatat bahwa ada 'air dalam tarif' yang signifikan, dengan kesenjangan yang besar antara tarif yang ditetapkan dan tarif yang diterapkan.

Selama periode TPR, ekonomi tumbuh dengan rata-rata tahunan sebesar 3,4%, terutama didorong oleh konsumsi swasta dan ekspor neto. Di sisi penawaran,

sektor jasa meningkatkan kontribusinya terhadap PDB hingga mencapai 61% pada tahun 2019, sementara pangsa sektor manufaktur dan pertanian sedikit menurun. PDB nominal per kapita mendekati USD 8.000 pada tahun 2019, melewati ambang batas negara berpenghasilan menengah ke atas beberapa tahun yang lalu.

Pertumbuhan PDB Thailand mulai melambat sebelum pandemi pada tahun 2019, dan penguncian umum yang diberlakukan pada awal tahun 2020 memperburuk penurunan tersebut. Faktanya, Thailand sudah berada dalam resesi teknis sebelum penguncian pertama dimulai, dengan pertumbuhan tahun-ke-tahun yang mengalami kontraksi sebesar 0,3% pada kuartal keempat 2019 dan 2,5% pada kuartal pertama 2020. Penguncian umum selama hampir dua bulan dari akhir Maret hingga pertengahan Mei menghasilkan penurunan PDB kuartalan terbesar dalam 22 tahun terakhir yaitu 12,2% pada kuartal kedua. Angka ini hanya sedikit lebih rendah dari kontraksi kuartalan terburuk yang pernah terjadi selama AFC sebesar 12,5%.

Thailand adalah negara ASEAN yang paling bergantung pada pariwisata, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hotel dan restoran saja menyumbang 5,9% dari PDB (dari 12,1) dan 7,6% dari lapangan kerja pada tahun 2019. Pariwisata juga merupakan penghasil devisa utama negara ini, dengan layanan perjalanan yang menghasilkan USD 60,5 miliar, atau 73,8% dari total ekspor jasa, pada tahun 2019. Tidak mengherankan, pembatasan perjalanan internasional dan penutupan perbatasan domestik telah menghancurkan

sektor ini, yang menyebabkan kontraksi 28,3% dalam ekspor barang dan jasa pada kuartal kedua tahun 2020. Hal ini dikombinasikan dengan langkah-langkah pembatasan sosial yang terus berlanjut sepanjang tahun menyebabkan kontraksi PDB secara keseluruhan sebesar 6,1% pada tahun 2020.

Meskipun varian Delta yang sangat mudah menular menghasilkan wabah yang jauh lebih besar dan lebih lama pada tahun 2021, pemulihan ekonomi telah melambat tetapi belum tergelincir. Titik terendah yang dicapai pada kuartal kedua tahun 2020 tampaknya tidak akan terulang kembali dan kontraksi kuartalan telah menyempit sejak saat itu, sebelum berbalik menjadi sangat positif pada kuartal kedua tahun 2021. Pertumbuhan naik dari -2,6% pada kuartal pertama menjadi 7,5% pada kuartal kedua 2021, meskipun ini didorong oleh palung pada kuartal yang sama tahun lalu. Ada beberapa alasan mengapa wabah komunitas yang lebih parah tidak terlalu berdampak pada perekonomian kali ini. Respons yang tidak terlalu kejam dari pemerintah dengan pembatasan yang lebih tepat sasaran, kemampuan beradaptasi yang lebih baik dari bisnis dan peningkatan pengeluaran stimulus menjadi penyebab ketahanan pertumbuhan kali ini.

Thailand juga telah bereksperimen dengan menghapus pembatasan perbatasan secara sepihak dengan cara yang terkalibrasi, menggunakan pendekatan "sandbox" atau micro herd immunity yang memungkinkan perjalanan bebas karantina dari negara-negara tertentu ke tujuan wisata seperti Phuket dan Koh Samui. Meskipun masih

dalam tahap awal, upaya ini telah membuahkan hasil yang agak mengecewakan. karena penyerapan yang terbatas yang disebabkan oleh prosedur yang rumit dan penghindaran risiko, yang terakhir diperparah oleh wabah kecil yang disebabkan oleh wisatawan domestik dan bukan internasional. Langkah-langkah ini membantu membatasi kesenjangan yang semakin besar antara pembatasan pergerakan orang di dalam dan di luar negeri. Sementara perbatasan sebagian besar tetap ditutup, pembatasan domestik semakin dilonggarkan pada September 2021 meskipun kasus di masyarakat tetap tinggi. Seiring dengan peningkatan upaya vaksinasi, Thailand berencana untuk membuka lebih banyak tujuan wisata bagi pengunjung asing yang telah divaksinasi pada bulan November.

Meskipun Thailand tetap menjadi negara yang sangat terbuka dan berorientasi ke luar, Thailand telah menyeimbangkan kembali sumber pertumbuhannya antara domestik dan luar negeri setelah KKG. Total perdagangan sebagai bagian dari PDB telah turun dari puncaknya sebesar 150% pada tahun 2008 menjadi 110% pada tahun 2019 (Tabel 1). Barang-barang manufaktur menyumbang hampir tiga perempat dari ekspor Thailand dengan mesin listrik dan peralatan transportasi menyumbang hampir setengahnya. Pertanian masih menyumbang sekitar satu persen dari total ekspor pada tahun 2019. Impor juga terkonsentrasi pada barang-barang manufaktur, yang mencerminkan karakteristik perdagangan dua arah dari GSC, meskipun bahan bakar dan produk pertambangan lainnya juga penting. Sekitar sepertiga dari total perdagangan dilakukan dengan Tiongkok,

dengan impor sekitar dua kali lipat dari ekspor. ASEAN dan Cina merupakan mitra dagang terbesar, diikuti oleh Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Thailand telah mengalami surplus neraca berjalan selama periode TPR, yang mengarah pada akumulasi cadangan devisa yang substansial. Cadangan devisa tersebut mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar USD 258 miliar pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan apresiasi baht yang kuat dan kekhawatiran akan daya saing, yang sedikit diringankan oleh depresiasi selama pandemi.

Perdagangan dan FDI semakin saling terkait mengingat keterlibatan Thailand yang semakin meningkat dalam GSC. Negara ini sangat terbuka terhadap FDI, dengan berbagai insentif investasi yang diberikan kepada industri dan wilayah tertentu, dengan fokus yang lebih baru pada Koridor Ekonomi Timur. FDI telah memainkan peran penting dalam mengubah Thailand dari ekonomi yang sebagian besar agraris menjadi pusat ekspor manufaktur. Jepang terus menjadi sumber utama PMA dan pendorong utama integrasinya ke dalam GSC di sektor elektronik dan otomotif. Arus masuk dari Cina, Hong Kong dan Amerika Serikat terus signifikan, meskipun arus masuk dari Uni Eropa telah menurun. Terlepas dari arus masuk FDI yang besar, Thailand telah menjadi eksportir modal bersih dengan pangsa investasi baru yang signifikan ke negara-negara tetangga Mekong.

ILO memperkirakan ada sekitar 2,8 juta pekerja migran berdokumen pada pertengahan hingga akhir tahun 2019,

setengahnya berasal dari Myanmar, sementara Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB menyebutkan angka antara 4 hingga 5 juta pekerja migran yang tidak berdokumen (Kelompok Kerja Tematik PBB untuk Migrasi di Thailand, 2019). Pekerja migran umumnya berusia lebih muda daripada pekerja lokal dan tersebar di sektor-sektor yang dapat diperdagangkan (industri manufaktur dan makanan laut) dan sektor yang tidak dapat diperdagangkan (konstruksi). Para pekerja ini telah menjadi kunci dalam mempertahankan daya saing internasional Thailand dengan memoderasi apresiasi nilai tukar riil, terutama karena penguatan baht selama periode TPR, dan dalam memastikan pasokan tenaga kerja berketerampilan rendah dan berbiaya rendah yang memadai.

Resesi baru-baru ini telah menyebabkan terjadinya penghematan besar-besaran dan pemulangan pekerja migran, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen. Nasib pekerja migran menjadi lebih buruk setelah mereka ditargetkan sebagai pembawa risiko lebih tinggi dalam menyebarkan virus corona dan dijauhi oleh negara tuan rumah dan negara asal. Ada kekhawatiran bahwa pembatasan yang diberlakukan selama pandemi terhadap pekerja migran akan tetap berlaku lama setelah pembatasan tersebut diberlakukan dan pada akhirnya dapat merembet pada peningkatan arus tidak berdokumen melintasi perbatasan yang tidak aman. Peningkatan seperti itu tampaknya hampir tidak dapat dihindari, mengingat faktor pendorong dan penarik, kecuali jika sentimen proteksionis dan nasionalis yang

meningkat dapat diatasi dan pembatasan-pembatasan dapat diturunkan.

Ketergantungan Thailand yang besar pada pariwisata dan perdagangan jasa yang terkait dengan perjalanan, serta perdagangan barang yang terkait dengan rantai pasokan manufaktur berarti bahwa Thailand tidak dapat berpaling ke dalam atau menyerah pada tekanan anti-globalisasi di dalam negeri. Ini adalah tantangan langsung yang dihadapi Thailand dalam fase penyesuaian pasca pandemi. Meskipun ketidakpastian politik yang sedang berlangsung dan ketegangan sosial telah menimbulkan kekhawatiran atas tata kelola pemerintahan, sejauh ini hal tersebut tidak mempengaruhi kebijakan perdagangan. Fakta bahwa Thailand adalah negara ASEAN pertama yang meratifikasi RCEP adalah bukti dari hal tersebut.

Ke depannya, Thailand perlu mengatasi sejumlah tantangan jangka panjang jika ingin terus menuai manfaat dari perdagangan. dan memastikan bahwa ada dukungan sosial dan politik yang memadai untuk tetap terbuka dan berwawasan ke luar. Hal ini sangat penting mengingat meningkatnya gelombang anti-globalisasi yang dipicu oleh pandemi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama berkaitan dengan berbagai jenis ketidaksetaraan yang masih ada. Meskipun ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks Gini tampaknya telah menurun tajam dari 47,9 pada tahun 1992 menjadi 36,4 pada tahun 2019, angka ini masih cukup tinggi dan kemungkinan besar telah memburuk sebagai akibat dari pandemi. Selain itu, meskipun ketimpangan

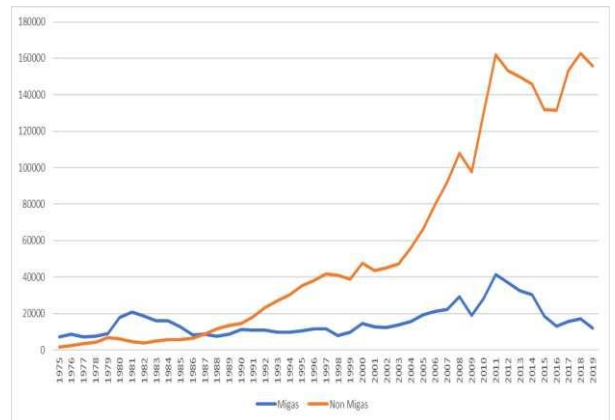
pendapatan telah menurun, ketimpangan kekayaan justru meningkat. Laporan Credit Suisse (2018) menemukan bahwa kesenjangan kekayaan di Thailand merupakan yang tertinggi di dunia pada tahun 2018, dengan 1% orang terkaya menguasai 67% kekayaan negara. Keresahan sosial kemungkinan besar akan meningkat kecuali jika kesenjangan ketidaksetaraan ini dipersempit.

Melihat lebih jauh ke depan, populasi Thailand yang menua dengan cepat dan menyusutnya jumlah tenaga kerja akan memberikan tekanan baru pada pertumbuhan dan posisi fiskalnya. Hal ini juga akan mempengaruhi produktivitas dan daya saing tanpa investasi yang signifikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan membangun kembali infrastruktur fisik, sebuah situasi yang semakin menantang dengan menurunnya investasi publik dan swasta. Faktor-faktor ini bergabung untuk meningkatkan kebutuhan untuk tetap terbuka terhadap perdagangan dan menerima aliran tenaga kerja, modal dan teknologi, lebih dari sebelumnya.

Karakter pertumbuhan ekonomi di setiap negara memiliki kekhasan tersendiri. Indonesia yang berlimpah sumber daya alam memiliki keunggulan di bidang non migas seperti yang tergambar dalam Gambar 1. Sejak tahun 1975 hingga tahun 2019 sektor nonmigas mendominasi kegiatan ekspor di Indonesia. Tingginya nilai ekspor non migas tersebut didukung oleh banyaknya sumber daya alam yang dimiliki yang dapat diolah menjadi produk-produk mentah bahan baku industry seperti bahan bakar pelikan yang mendominasi ekspor non migas. Nilai ekspor tertinggi kedua adalah barang-barang buatan pabrik.

Informasi tersebut mengindikasikan bahwa ekspor yang dilakukan Indonesia tidak lagi bertumpu pada bahan mentah saja, namun barang setengah jadi dan barang jadi.

Gambar 1 Ekspor Indonesia (Juta US\$)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Peningkatan jumlah ekspor non migas secara terus menerus berbanding terbalik dengan ekspor migas. Hal tersebut dikarenakan migas adalah komoditas yang tidak dapat diperbaharui dan nilai volumenya yang terus menurun. Salah satu bentuk antisipasi pemerintah untuk dapat tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya terbaharukan yang tersedia di setiap sudut wilayah Indonesia. Jika dilihat nilai PDB dengan memperhatikan nilai ekspor tersebut, pertumbuhan ODB di Indonesia masih memiliki nilai pertumbuhan di kisaran 6 – 7% antara tahun 2010 hingga 2019.

**Tabel 1 Perkembangan PDB
Indonesia dan Thailand 2014-2018
(BOP Milyar USD)**

Sumber: *World Bank*, 2020

Berdasarkan Tabel 1 nilai PDB Indonesia dan Thailand mengalami peningkatan dari tahun 2014 – 2018. Hal ini memberikan harapan bagi Indonesia dan Thailand untuk keluar dari krisis keuangan global. Selain itu, meningkatnya PDB maka dapat meningkatkan nilai produksi dan daya beli terhadap produk atau barang impor seperti barang modal dan barang baku.

Kegiatan ekspor dan impor sangat penting dalam menjalin hubungan antar negara untuk meningkatkan nilai dari Produk Domestik Bruto, dibandingkan dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Ekspor menjadi salah satu keuntungan dari kerjasama dengan negara lain untuk menambah devisa negara. Hasil dari devisa tersebut dapat digunakan untuk membiayai impor sebagai nilai tambah, dari proses produksi dan dapat juga membiayai pembangunan daerah. Hal ini, terjadi akibat dari negara yang tidak mampu dalam memproduksi secara efisien. Sehingga mengakibatkan berbagai negara melakukan kegiatan impor untuk mengatasi kekurangan pada kebutuhan negara. Dengan demikian, dengan adanya kegiatan impor maka sangat dibutuhkan dalam perdagangan internasional (Saskara & Batubara, 2015).

Strategi lainnya yang dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperluas aktivitas ekspor dan mengurangi impor suatu negara. Perluasan tersebut dengan mendorong produksi produk ekspor untuk meningkatkan produk menjadi barang spesialisasi dengan tingkat keterampilan di

sektor ekspor. Dengan adanya hal tersebut, laju pertumbuhan ekonomi dipercepat melalui peran aktif mempromosikan barang dan jasa dari ekspor. Pada impor, negara

Tahun	PDB	
	Indonesia	Thailand
2014	890.814.755.233	407.339.361.696
2015	860.854.235.065	401.295.970.240
2016	931.877.364.178	412.352.789.520
2017	1.015.423.455.783	455.275.517.239
2018	1.042.173.300.626	504.992.757.705

dengan pendapatan menengah diharapkan dapat menurunkan impor agar perekonomian berjalan positif agar volume impor tidak menyebabkan angka negatif atau defisit (Uddin, Khan, & Alam, 2010).

Masalah tidak dapat terjadi apabila anggaran pemerintah diputuskan untuk menghemat dan investasi dialihkan oleh pihak swasta, maka akan mengakibatkan peningkatan dalam defisit neraca berjalan. Namun, di sisi lain penerapan kebijakan diperlukan untuk meminimalisir defisit eksternal terjadi apabila neraca berjalan tidak membuat krisis mata uang negara. Proses penyesuaian dilakukan dalam defisit transaksi berjalan yang tidak lebih dari 5% dari produk domestik bruto, dianggap normal apabila terjadi defisit transaksi berjalan (Astuti & Ayuningtyas, 2018).

**Tabel 2 Perbandingan Fasilitas
Perpajakan Indonesia dengan Thailand**

Indonesia	Thailand
Penambahan “Deductible Expense” sebesar 30% untuk 5 tahun.	Pembebasan pajak penghasilan tahunan, pajak impor pada daerah industry tertentu untuk kurun waktu tertentu tergantung daerah zona tertentu.

Depresiasi dipercepat.	Zona 1:3 tahun; pembebasan bea masuk 50% untuk mesin dan 100%** untuk bahan baku yang akan diekspor Kembali.
Dividen dari luar negeri dari 20% menjadi 10%.	Zona 2:3-7 tahun; pembebasan bea masuk 50% untuk mesin dan 100%** untuk bahan baku produksi yang akan diekspor Kembali.
Penambahan kompensasi kerugian maksimal 5 tahun.	Zona 3:8 tahun**;; pembebasan bea masuk 50% untuk mesin dan 100%** untuk bahan baku produksi yang akan diekspor Kembali.

* (Dibidang dan daerah tertentu)

** (Zona 1,2 = 1 tahun; Zona 3 = 5 tahun)

*** (adanya tambahan fasilitas perpajakan lainnya)

KESIMPULAN

Kebijakan perdagangan dan komersial di kedua negara mencerminkan interaksi antara geografi, sejarah, dan institusi domestik serta ekonomi politik, bersama dengan berbagai faktor regional dan global. Bisa dikatakan bahwa faktor global merupakan pendorong utama kebijakan ekonomi internasional selama satu dekade terakhir, karena hanya ada sedikit perubahan dalam pengaturan kebijakan perdagangan yang bersifat diskresioner. Pertama, kedua negara menandatangani protokol Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, yang melanjutkan tren peningkatan integrasi ekonomi ASEAN, yang penting dalam konteks pengaturan kebijakan yang

berwawasan ke luar di mana konsesi intra-regional pada umumnya dimultilateralisasi.

Kedua, kedua negara, khususnya Thailand, merupakan pemain penting dalam GSC yang agar dapat berjalan dengan efektif, membutuhkan pergerakan barang (terutama komponen antara) yang cepat dan tanpa hambatan melintasi perbatasan internasional. Ketiga, selama periode ini, Cina telah muncul sebagai negara adidaya ekonomi regional yang tak terbantahkan, termasuk sebagai pedagang, investor, dan sumber wisatawan. Skalanya sedemikian rupa sehingga telah menurunkan harga global manufaktur yang menjadi spesialisasinya, secara substansial memengaruhi tren harga komoditas global, dan membentuk kembali struktur GSC. Kebangkitan RRT juga memiliki dampak yang berbeda pada kedua perekonomian. Sebagai contoh, dampaknya terhadap harga energi dan mineral global menyebabkan volatilitas yang lebih besar dalam persyaratan perdagangan Indonesia, sementara meningkatnya ketenaran Cina sebagai sumber pariwisata global dan sebagai pusat GSC berdampak lebih langsung pada Thailand.

Kedua laporan WTO ini memberikan survei komprehensif mengenai kebijakan perdagangan dan komersial. pengaturan Indonesia dan Thailand. Mengikuti format standar, kedua laporan ini dimulai dengan survei ekonomi umum, termasuk pola perdagangan dan investasi. Materi utama yang utama berkaitan dengan pemeriksaan yang sangat rinci terhadap struktur dan jadwal tarif, di samping berbagai langkah terkait perdagangan termasuk keanggotaan berbagai pengaturan perdagangan

preferensial, keberadaan zona ekonomi khusus dan langkah-langkah reformasi parsial yang terkait, dan peran perusahaan negara dan program pengadaan pemerintah.

Untuk tinjauan di masa depan, ada tiga topik tambahan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, terdapat banyak literatur akademis mengenai kebijakan perdagangan kedua negara, yang sebagian kecil di antaranya dikutip dalam jurnal ini. Akan sangat berguna jika laporan-laporan ini dapat bersumber di luar materi resmi pemerintah dan laporan-laporan dari lembaga-lembaga internasional utama, yang memang berguna. Kedua, telah ada beberapa penelitian besar mengenai perlindungan yang efektif di kedua negara, terutama di sektor manufaktur, dan penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai struktur insentif intersektoral rezim kebijakan tersebut. Ketiga, meskipun diakui bahwa WTO tidak berada dalam posisi untuk memberikan komentar politik, beberapa pengertian tentang ekonomi politik kebijakan perdagangan, dan implementasi praktis dari banyak kebijakan yang dibahas dalam laporan ini, mungkin sejalan dengan apa yang telah dijelaskan di atas, akan membantu para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. and W. Berenschot (2019), *Democracy for Sale. Elections, Clientelism and the State in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca.
- Astuti, I. P., & Ayuningtyas, F. J. (2018). Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*, 19(1), 1-10.
- Athukorala, P.C. (2014), 'Global Production Sharing and Trade Patterns in East Asia', in L. Kaur and N. Singh (eds), *Oxford Handbook of the Economics of the Pacific*, Oxford University Press, New York, pp. 333-361.
- Basri, M.C. (2012), "Indonesia's Role in the World Economy: Sitting on the Fence", in A. Reid (ed). *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, pp. 28-48.
- Basri, M.C. (2001), *The Political Economy of Manufacturing Protection in Indonesia*. unpublished PhD thesis, Australian National University.
- Basri, M.C. and H. Hill (2004), 'Ideas, Interests and Oil Prices: the Political Economy of Trade Reform during Soeharto's Indonesia', *The World Economy*, 27(5), pp. 633-656.
- Credit Suisse. (2018), *The Global Wealth Report and Databook*, Credit Suisse, Geneva.
- Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) (2021), *Impact of the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) on Intra-ASEAN Trade*. ERIA, Jakarta.
- Fane, G. and T. Condon (1996), *Trade Reform in Indonesia, 1987-1995*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 32 (3), pp. 33-54.

- Ginting, E. and K. Naqvi (eds) (2020). Reforms. Opportunities and Challenges for State-Owned Enterprises, Asian Development Bank, Manila.
- Hill, H. and J. Menon (2012), 'ASEAN Economic Integration: Driven by Markets, Bureaucrats, or Both?', in M. E. Kreinin and M. Plummer (eds.), *Handbook of International Commercial Policy*, Oxford University Press, Oxford, pp. 357-86.
- Hutchinson, F.E. (2017), *Rowing Against the Tide? Batam's Economic Fortunes in Today's Indonesia*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- Jongwanich, J. (2021), *The Economic Consequence of Globalization: Evidence from Thailand*, Routledge, London, forthcoming.
- Kimura, F. (2006), 'International Production and Distribution Networks in East Asia: Eighteen Facts, Mechanics, and Policy Implications', *Asian Economic Policy Review*, 1, pp. 326-344.
- Marks, S.V. (2017), 'Non-Tariff Trade Regulations in Indonesia: Nominal and Effective Rates of Protection', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53 (3), pp. 333-357.
- Menon, J. (2014), 'Multilateralization of Preferences versus Reciprocity when FTAs are Underutilized', *The World Economy*, 37, pp. 1348-66.
- Menon, J. (2018), 'Can FTAs Support the growth and spread of Global Production Networks', in J. Menon and T.N. Srinivasan (eds.) *Integrating South and East Asia: Economics of Regional Cooperation and Development*. Oxford University Press, Oxford, pp. 59-92.
- Pangestu, M., S. Rahardja and L.Y. Ing (2015), 'Fifty Years of Trade Policy in Indonesia: New World Trade, Old Treatments', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51 (2), pp. 239-261.
- Saskara, I. N., & Batubara, D. M. (2015). Analisis Hubungan Ekspor, Impor, PDB dan Utang Luar Negeri Indonesia Periode 1970-2013. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 44312.
- Uddin, G., Khan, S., & Alam, M. (2010). An empirical study on export, import and economic growth in Bhutan. *Indian Development Review*, 8(1), 95-104.